

PENDIDIKAN BERBASIS BUDI PEKERTI

Menguak Karakter Pendidikan Bangsa yang Terlupakan

Oleh: Zuhairansyah Arifin

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Riau

Abstract

Moral or character education represents one of the principal loads in the implementation of the Competency-Based Curriculum and it is carried out by means of an integrated learning approach. Problems arise because not all teachers possess the potential sensitivity adequate for identifying and analyzing materials for character education in the learning materials or lesson books used. The teachers tend to merely teach whatever is explicit in the learning materials while the materials for character education implicit in the learning materials are not perceived and revealed. As a result, the character education implied is not worked out and does not reach the learner. To solve the problem, certain strategies need to be employed in carrying out character education integrated in the competency-based class subjects. The strategies cover presentation and learning strategies, the former further covering implicit and explicit strategies and the latter further covering deductive and inductive strategies. The identification, interpretation, and analysis of materials for character education should be made to fit the local cultural context (implying Contextual Teaching and Learning).

Kata Kunci : Pendidikan, Nilai, Budi Pekerti, Dan Moral

Pendahuluan

Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan seseorang yang memiliki basis ilmu pengetahuan guna ditransfer kepada anak didik dalam proses belajar mengajar. Pendidikan yang baik semestinya membuat perencanaan-perencanaan yang matang sesuai target yang akan dicapai, dan tentunya mencakup ketiga ranah, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Namun sayangnya, aspek afektif yang notabene merupakan aspek paling penting dalam mengarahkan perilaku dan budi pekerti anak didik sering terabaikan sehingga acap kali aspek ini menjadi kendala dalam penilaian dan menjadi item yang kurang *include* ke dalam target-target pencapaian pembelajaran.

Berdasarkan fenomena dewasa ini, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan, baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah, pendidikan karakter atau budi pekerti seolah-olah bukan sesuatu yang padu, sehingga para guru sering hanya menilai aspek kognitif saja yang dianggap paling urgen.

Pendidikan dan Budi Pekerti

Pendidikan dalam pandangan John S. Brubacher adalah proses timbal balik dari setiap individu dengan individu lain dalam rangka penyesuaian dirinya dengan alam semesta. Pendidikan juga merupakan perkembangan kemampuan manusia yang terorganisasi dari semua potensinya, baik menyangkut moral, intelektual maupun jasmani, yang diharapkan mampu menghimpun aktivitas menuju kehidupan akhir.¹

M. Arifin, memberikan definisi pendidikan “sebagai perkembangan dan kelengkapan dari kemampuan-kemampuan manusia baik moral, intelektual maupun jasmaniah yang diorganisasikan, dengan kepentingan individual atau sosial dan diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang bersatu dengan penciptanya sebagai tujuan akhirnya”.²

Ahmad D. Marimba mengartikan, pendidikan sebagai “bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama”.³

¹ John S. Brubacher, (1958), *Modern Filoshofis of Education in Cultural Perspective*, The Dryden Press, New York, hlm. 354

² M. Arifin, (1987), *Filsafat Pendidikan Islam*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 12

³ Ahmad D. Marimba, (1989), *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, al-Ma'arif, Bandung, hlm. 19. M. Athiyah al-Abrasyi, (1982), *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, ang, 1977

Dengan defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, sebagai proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir (intelektual) maupun daya perasaan (emosional), menuju ke arah tabiat manusia.

Selanjutnya budi pekerti dapat diartikan sebagai watak, perangai, akhlak.⁴

Muhammad Ali dalam *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, menyamakan moral dengan akhlak, serta meliputi ajaran baik dan buruk perbuatan manusia.⁵

J. Drost, SJ mengemukakan budi pekerti adalah karakter, akhlak, dan juga nama untuk cara membentuk karakter itu, di mana di dalam sebuah sekolah tanggung jawab pokok untuk pembentukan budi pekerti/moral maupun intelektual pelajar tidak terletak pada salah satu prosedur atau kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler akan tetapi pada pengajar.⁶

Dari defenisi tersebut diketahui bahwa pendidikan berbasis budi pekerti merupakan suatu pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja kepada anak didik dengan mengedepankan budi pekerti/moral sebagai acuan pembentukan akhlak menuju terbentuknya kepribadian utama. Tenaga pengajar merupakan figur yang layak dicontoh oleh siswa dalam segala prilakunya. Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar mencontoh pemimpin yang layak diteladani dalam kehidupan. Oleh karena itu siswa di sekolah sudah tentu mencontoh guru mereka untuk dijadikan suri teladan dalam mengikuti pelajaran. Allah SWT menganjurkan manusia untuk meneladani seseorang yang benar-benar bisa diyakini keagungan akhlaknya, Allah menggambarkan pribadi Rasul sebagai figur yang pantas diikuti semua umat. Gambaran tersebut dapat dilihat dalam surat *al-Ahzab*: 21 :

Artinya : “*Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah*”⁷

Firman tersebut dipertegas oleh Rasulullah dalam hadisnya:

Dari Abu Hurairah bersabda Rasulullah saw: Sesungguhnya aku diutus ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlah manusia.

Dari hadis tersebut dipahami bahwa Rasul sebagai nabi terakhir merupakan pembawa berkah bagi alam, karena beliau adalah satu-satunya figur teladan yang pantas diikuti setelah para nabi sebelumnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat *al-Anbiya* : 107 (Dan aku tidak diutus ke dunia ini kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam).

Berdasarkan ketiga dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan berbasis budi pekerti (akhlak) pada prinsipnya dapat terealisasi jika ada figur yang layak dicontoh (*uswatun hasanah*). Guru dan Dosen di lembaga dan institusi pendidikan lah yang selayaknya menjadi contoh teladan bagi siswa dan mahasiswa, maka tenaga-tenaga pendidik ini harus selalu siap untuk digugu dan ditiru layaknya figur umat yang tidak boleh sedikitpun memunculkan sesuatu yang tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang figur atau pendidik moral anak-anak bangsa.

Pendekatan dan Strategi Pendidikan Budi Pekerti

1. Pendekatan Pendidikan Budi Pekerti

Penerapan pendidikan budi pekerti dalam konteks pendidikan nasional saat ini menggunakan pendekatan “pengintegrasian” dan “peningkatan” dengan cara mengoptimalkan isi, proses, dan pengelolaan pendidikan saat ini guna mencapai tujuan pendidikan nasional.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1995), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 98

⁵ Muhammad Ali, (t.t), *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, hlm. 256

⁶ J. Drost, SJ, (2005), *Dari Kurikulum Bertujuan Kompetensi (KBK) Sampai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 35-36

⁷ Q.S. Al-Ahzab: 21

⁸ Ahmad ibn Hanbal, (1994), *Musnad li Imam Ahmad ibn Hanbal*, Juz 3, Dar al-Fikri, Bairut, hlm. 210

Ki Mohamad Said Reksohadiprodo mengemukakan bahwa pendekatan pendidikan sekarang ini perlu memperhatikan trik dan metode yang digiring kepada suatu pola asas *asih-asah-asuh* yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara,⁹ diolah dalam cara pendidikan *among* yang biasanya dirumuskan dalam tiga kalimat :

(1) *Tutwuri* (dengan penuh perhatian dan kasih sayang) *handayani* (mempengaruhi); (2) *Ing madya* (melalui komunikasi dua arah) *mangun karsa* (menggairahkan semangat); (3) *Ing ngarsa* (membimbing) *sung tuladha* (melalui contoh dan teladan yang nyata)¹⁰

Ing ngarso sang tulada, berarti bahwa seorang pendidik harus mampu lewat sikap dan perbuatannya menjadikan dirinya sebagai pola anutan dan ikutan orang-orang yang dididik atau dipimpinya; *Ing madya mangun karsa*, berarti bahwa seorang pendidik harus mampu membangkitkan semangat berswakarya (mandiri) dan berkreasi pada orang-orang yang dididik; dan *Tutwuri handayani*, berarti bahwa seorang pendidik harus dapat memberi dorongan pada orang-orang yang diasuhnya agar berani berjalan di depan (menjadi pelopor) dan sanggup bertanggung jawab.

Ketiga semboyan Ki Hajar Dewantara di atas, pada prinsipnya masih layak diterapkan dalam rangka pendekatan atau metode penerapan pendidikan moral atau budi pekerti. Dengan pendekatan seperti itu, diharapkan akan terbina keikhlasan dan kejujuran, setia kepada apa yang diyakini benar dan adil penuh tanggung jawab atas nasib pribadi, keluarga, anak didik, bangsa serta memupuk suasana gembira, ketentraman, kedamaian dan tak lupa berterima kasih kepada Tuhan atas eksistensinya di dunia.

Abul A'la al-Maududi secara gamblang merinci pembagian moral kepada tiga yaitu: moral yang bersifat agama, moral tanpa agama, dan moral sekuler.¹¹

1. Moral yang Bersifat Agama

Moral yang bersifat agama dibagi kepada dua bagian yaitu:

- a. Moral Politheistik, maksudnya adalah manusia yang meyakini adanya Tuhan selain Allah SWT.¹² Mayoritas manusia telah bersalah karena telah menyekutukan Tuhan Yang Satu. Manusia telah menyembah tuhan-tuhan yang lain serta makhluk-makhluk lain yang mereka agungkan. Mereka meyakini bahwa tuhan-tuhan tersebut akan memberi rezeki dan menyembuhkan mereka dari penyakit. Kepercayaan *politheis* ini menjadikan doktrin kehidupan akhirat itu tidak masuk akal, sehingga seluruh struktur moralitas yang telah ditetapkan agama, runtuh menjadi debu.¹³

Ber macam-macam orang telah berupaya membuktikan bahwa nilai-nilai spritual merupakan bagian dari beragam tradisi keagamaan. Akan tetapi, meskipun kita bisa sepakat dengan seperangkat nilai-nilai spritual tertentu, kita hanya bisa mendapatkan gagasan yang abstrak. Begitu kita keluar dari semua abstraksi, kita memasuki bukan saja alam metafora spritual tetapi juga kosmologi, mitos, teladan manusia, seremoni, dan praktik. Kita relatif berada di daerah yang aman selama mendukung gagasan-gagasan yang umum dan abstrak.¹⁴

Dalam keyakinan moral Politheistik, agama lain seperti agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha, Khong Hou Chou masing-masing memiliki Tuhan. Para siswa di sekolah seperti SMP dan SMA tentu memiliki beragam agama, oleh karena itu para siswa akan dididik melalui nilai-nilai universal agama yang mereka anut. Nilai-nilai tersebut diimplementasikan melalui program pendidikan berbasis budi pekerti ke dalam integrasi tiga mata pelajaran, yaitu mata pelajaran agama, PPKN, dan Bahasa Sastra Indonesia.

- b. Moralitas Zuhud, yaitu semua orang yang memiliki agama, berkata benar, bersifat jujur dalam kepercayaan kepada Tuhan dan tidak sedikit pun mereka meragukan kehidupan akhirat termasuk ke dalam golongan (tingkatan moral) zuhud.¹⁵ Maka orang-orang seperti ini akan dirahmati Tuhan karena memiliki kepribadian

⁹ Ki Mohamad Said Reksohadiprodo, (1983), *Masalah Pendidikan Nasional*, Haji Masagung, Jakarta, hlm. 75

¹⁰ Madyo Ekosusilo dan R.B. Kasihadi, (t.t.) *Dasar-dasar Pendidikan*, Effhar Publishing, Semarang, hlm. 69-70

¹¹ Abul A'la al-Maududi, (1997), *Ethical Viewpoint of Islam*, terj. A. Rahman Zainuddin, *Moralitas Islam*, Media Dakwah, Jakarta, hlm. 17 dan 21

¹² *Ibid.*, hlm. 11

¹³ *Ibid.*, hlm. 13

¹⁴ Kabir Helminski, (2002), *The Knowing Heart: A Sufi Path of Transformation*, terj. Abdullah Ali, *Hati yang Bermakrifat*, Pustaka Hidayah, Bandung, hlm. 213

¹⁵ Abul A'la al-Maududi, *op.cit.*, hlm. 15

yang tinggi dan mulia. Tetapi pada umumnya mereka kata Maududi, tidak efektif karena konsepsi mereka yang sempit mengenai agama dan kehidupan kerohanian.

Moralitas zuhud, merupakan bagian dari hakekat tasawuf. Mustafa Zahri mengemukakan, orang yang berkecimpung dalam dunia tasawuf, biasanya tujuan hidup mereka tidak didasarkan kepada nilai-nilai materi yang dapat ditumpuk untuk memperkaya diri, tetapi pada nilai-nilai ibadah, memandang Akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Akhlak mereka sangat tawadhu' bagaikan "padi makin berisi makin tunduk".¹⁶ Orang-orang yang menjalani kehidupan tasawuf secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan dan ajaran Islam, bisa memperoleh gelar (panggilan) sebagai ahli sufi. Jadi, kehidupan zuhud merupakan salah satu bagian dari aktivitas tasawuf yang dilakukan seseorang. Dan orang yang melakukannya dinamakan dengan sufi.

c. Moral tanpa Agama

Tingkatan moral yang kedua ini, diarahkan kepada bangsa-bangsa berkuasa, yang mengendalikan masalah-masalah kemanusiaan tidak mengandung konsepsi ketuhanan dan akhirat.¹⁷ Tingkatan moral tanpa agama bisa dilebelkan kepada negara-negara *super power* seperti negara Amerika yang bisa seenaknya saja menyerang negara lain tanpa memperdulikan nilai-nilai agama dan ketuhanan. Para penguasa tersebut merasa apa yang diperbuat merupakan langkah yang tepat dan mendapat dukungan dari orang banyak.

Kata Maududi, Dr. Adler dari Columbia University adalah salah seorang pioner gerakan ini, yang dimulai pada 1876 M. Kepercayaan pokok gerakan moral ini dinyatakan dalam kata-kata berikut:

Untuk menyatakan kepentingan yang terpenting dari faktor etika dalam semua hubungan kehidupan, baik pribadi maupun masyarakat, bangsa dan internasional, terpisah dari pertimbangan-pertimbangan keagamaan dan metafisika.¹⁸

Gerakan ini kemudian menjalar ke Inggris, tempat dibentuknya Persatuan Perkumpulan Etika (*Union of Ethical Societies*). Perkumpulan ini kemudian menyatukan diri ke dalam Persatuan Etika (*Ethical Union*) tahun 1928.

Tujuan yang terpenting dari pembentukan Persatuan Etika ini adalah: untuk meningkatkan studi mengenai dasar-dasar etika dengan cara-cara yang legal, untuk memajukan gagasan atau agama dari persahabatan manusia, berdasarkan prinsip tujuan tertinggi agama adalah kecintaan kepada kebaikan dan gagasan moral terpisah dari kepercayaan-kepercayaan tentang wujud terakhir dari segala benda tentang kehidupan akhirat.

d. Moral Sekuler

Moral sekuler yang dimaksudkan Maududi di sini adalah *summum bonum*, yaitu tindak tanduk manusia harus diarahkan, dipertimbangkan, apakah yang dikatakan baik, jahat, benar, salah, berbudi atau tercela.¹⁹ Bagaimana pula mengetahui tindakan yang terpuji dan tercela? Apa sumber yang benar dari pengetahuan ini?

Jawaban dari semua ini, telah memunculkan pendapat yang berbeda-beda. Sebagian mengatakan, pengalaman manusia adalah satu-satunya sumber yang dapat dipercaya (*Emperisme*), sebagian lain mengatakan intuisi, dan sebagian lain mengatakan rasio. Semua pendapat ini akhirnya saling menyalahkan mana yang lebih layak bagi dirinya, sehingga terjadilah apa yang dinamakan dengan moral sekuler.

2. Strategi Pengembangan Budi Pekerti

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan cara atau upaya bagaimana agar tujuan dapat dicapai.²⁰ Strategi yang memuat taktik, kiat dan *approach*, pada prinsipnya adalah sebahagian kecil dari unsur menuju sebuah kesuksesan pendidikan. Strategi dalam dunia pendidikan berbeda dengan strategi dalam dunia perusahaan, namun masih memiliki akar yang sama, di mana di antara kedua jenis ini masih saling mendukung satu sama lain.²¹

¹⁶ Mustafa Zahri, (1995), *Kunci Memahami Ilmu Tasawuf*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 137

¹⁷ Abul A'la al-Maududi, *Ethical View...*, *op.cit.*, hlm. 17

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 18

¹⁹ Abul A'la al-Maududi, *Ethical View...*, *op.cit.*, hlm. 21

²⁰ Husein Umar, (2003), *Strategic Management in Action*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 31

²¹ *Ibid.*, hlm. 26-27

Strategi dalam dunia pendidikan difokuskan kepada pencapaian kualitas belajar mengajar, baik dari pihak guru maupun siswa. Sifat strategi yang dilaksanakan mengacu kepada teori-teori pendidikan yang disampaikan guru di kelas. Dalam dunia pendidikan para siswa tidak mendapat bayaran/gaji dari kehadirannya di sekolah, tetapi sebaliknya siswa harus membayar SPP untuk bisa memaasuki dunia sekolah.

Sedangkan strategi dalam dunia perusahaan difokuskan kepada bagaimana mengelola perusahaan sehingga menghasilkan produksi yang bermutu dan laris di pasaran. Dunia perusahaan memerlukan tenaga-tenaga yang siap ditempatkan di lapangan di samping tenaga-tenaga professional dalam mengelola pemasaran barang dan perencanaan ke depan. Semua tenaga kerja perusahaan memperoleh upah/gaji dari perusahaan, sesuai dengan kapasitasnya dan kinerjanya.

Sesuai dengan visi dan misi pendidikan budi pekerti,²² yang selama ini banyak dimaknai secara tradisional dan lokal telah dirumuskan dan didudukkan kembali menjadi “pendidikan budi pekerti” yang diyakini akan memberikan kontribusi yang bermakna dalam upaya pembentukan “manusia Indonesia seutuhnya”. Pendidikan budi pekerti dalam perencanaan pendidikan nasional Indonesia adalah : (1) pendidikan budi pekerti bukanlah sebuah mata pelajaran yang berdiri sendiri; (2) pendidikan budi pekerti menjadi bagian integral dari mata pelajaran lain yang relevan, khususnya mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) serta mata pelajaran lain seperti bahasa, sejarah, sosiologi, dan ketarmpilan.

Pengembangan pendidikan budi pekerti selanjutnya dirumuskan oleh Depdiknas melalui perumusan jangka pendek dan panjang, yaitu :

Jangka pendek

1. Menyusun dan menerbitkan Pedoman Umum dan Nilai Budi Pekerti untuk Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Menyusun dan menerbitkan Pedoman Penciptaan Suasana Lingkungan yang Kondusif dalam rangka pembudayaan budi pekerti luhur bagi warga sekolah
3. Menyusun dan menerbitkan Model Pengintegrasian Pendidikan Budi Pekerti ke dalam mata pelajaran Pendidikan Agama; pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) untuk guru SD/MI, SLTP/MTs, dan SMU/SMK/MA
4. Menyelenggarakan seminar nasional pendidikan budi pekerti untuk mendapat masukan tentang keseluruhan perangkat pendidikan budi pekerti
5. Menyusun dan menerbitkan Panduan Sosialisasi Pendidikan Budi Pekerti di Pusat dan di daerah serta melaksanakan sosialisasi pendidikan budi pekerti di pusat dan di 8 daerah sebagai sample rintisan yakni Sumatera Utara; Jawa Barat; Jawa Timur; NTT; NTB; Kalimantan Timur; dan Sulawesi Selatan; DKI Jakarta; dan Jawa Tengah.²³

Dari kelima rumusan jangka pendek di atas, tentu untuk pengembangan selanjutnya sekolah-sekolah membutuhkan kiat dan strategi tersendiri bagi setiap pimpinan dalam menjalankan dan mengintegrasikan pendidikan berbasis budi pekerti. Tentunya, dengan aturan yang tidak menyalahi sesuai ketentuan aturan yang ditetapkan dari pusat, oleh karenanya kiat dan model penerapan nilai-nilai yang sesuai dengan karakter bangsa bisa diformulasikan asalkan dapat menopang kemajuan pendidikan moral anak sesuai target perilaku dan moral yang sesuai dengan keinginan sekolah dan tidak menyimpang dari Undang-undang Negara dan agama.

Jangka panjang

1. Sosialisasi pendidikan budi pekerti melalui seminar nasional untuk semua guru mata pelajaran
2. Pengembangan sekolah sebagai laboratorium budi pekerti
3. Pengembangan bahan pengayaan untuk guru
4. Pengembangan panduan teknis untuk para insane media massa dan LSM
5. Pengembangan kompetensi dasar mata pelajaran dari semua mata pelajaran yang relevan

²² Departemen Pendidikan Nasional, (2002), *Pendidikan Budi Pekerti Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, hlm. 4-5

²³ *Ibid.*, hlm. 62

6. Pengembangan standar materi mata pelajaran dari masing-masing mata pelajaran yang mewadahi pendidikan budi pekerti yang dapat diwujudkan dalam bentuk bahan ajar budi pekerti yang sudah diintegrasikan ke dalam bahan ajar setiap mata pelajaran yang relevan secara proporsional²⁴

Adanya program jangka pendek dan jangka panjang tentang penerapan program pendidikan berbasis budi pekerti yang dirancang oleh Depdiknas Pusat, merupakan indikasi bahwa pendidikan pola ini layak dilaksanakan demi mengatasi keterpurukan moralitas dan akhlak siswa belakangan ini. Para pendidik perlu bekerja keras untuk mensosialisasikannya sehingga perwujudannya benar-benar menjangkau seluruh siswa dan sekolah bahkan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia.

3. Ukuran/Standarisasi Moral

Sejak dahulu, pembicaraan sekitar standarisasi moral selalu mendatangkan perdebatan yang tak habis-habisnya di kalangan kaum filosof. Ini disebabkan tidak adanya ukuran dan patokan yang jelas mengenai norma dan aturan-aturan sosial yang baku. Namun paling tidak dapat dibuat acuan yang dapat dipedomani oleh manusia.

Beberapa aturan norma moralitas menurut Poespoprodjo mempunyai ciri-ciri

1. Norma haruslah sedemikian rupa sehingga darinya bisa ditarik aturan-aturan moralitas yang sama untuk semua manusia
2. Norma haruslah sedemikian rupa sehingga darinya dapat ditarik semua aturan moralitas
3. Norma haruslah tidak dapat berubah, tetapi cukup fleksibel untuk memungkinkan adanya penerapan-penerapan sesuai dengan berbagai keadaan
4. Norma harus terus-menerus hadir dan nampak bagi semua orang. Meskipun terdapat situasi-situasi dalam hidup yang di dalamnya suatu perbuatan manusiawi (*human act*) tidak mungkin, tetapi hanya perbuatan manusia (*an act of a man*).²⁵

Sementara itu, Poedjawiyatna dalam bukunya *Etika Filsafat Tingkah Laku* mengemukakan bahwa ada beberapa aliran mencoba memformulasikan standar nilai-nilai moral yang terkenal dengan aliran Hedonisme, aliran Utilitarianisme, aliran Vitalisme, aliran Sosialisme dan aliran Religiosisme dan aliran Humanisme.²⁶

1. Aliran Hedonisme

Aliran hedonisme sebenarnya terdapat di berbagai penjuru dunia, namun aliran ini muncul pertama kali di Yunani, yang menyebutkan bahwa ukuran tindakan baik dalam bermoral adalah *hedone* : kenikmatan dan kepuasan rasa.

Bagi penganut hedonisme rasa puas dan bahagia disamakan. Bahagia itu menenangkan manusia, ia sudah tenang dalam hidup, maka yang menjadi permasalahan adalah apakah setiap kepuasan rasa itu selalu menghasilkan ketenangan? Dalam hal inilah timbul kemungkinan harus dibeda-bedakan macam dan sifat kepuasan. Ada kepuasan yang merupakan kebahagiaan dan menenangkan, tetapi ada juga kepuasan rasa belaka yang kemudian menimbulkan kehausan dan kegelisahan. Kepuasan manakah yang benar membahagiakan? Dan disini timbul lagi pertanyaan yang menjadi ukuran baik, yang belum terjawab, sebab macam itulah yang menentukan kebaikan dari tindakan yang memuaskan itu.

2. Aliran Utilitarianisme

Dalam pandangan aliran ini yang baik ialah yang berguna, Kalau ukuran ini berlaku bagi perorangan, disebut individual, dan jika berlaku bagi masyarakat (negara) disebut sosial. Kesulitannya terutama mengenai perorangan, berguna bagi seseorang, itu belum tentu berguna bagi orang lain. Jadi ukurannya tidak umum. Apa yang berguna hanya untuk mencapai tujuan. Dan ukuran yang menentukan baik buruknya sesuatu yang berguna belum jelas, dan masih memerlukan perdebatan yang pasti akan menimbulkan dua kubu yang bersebelahan.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 63-64

²⁵ W. Poespoprodjo, (1988), *Filsafat Moral, Kesusilaan dalam Teori dan Paktek*, Remadja Rosdakarya, Bandung, hlm. 129-130

²⁶ Poedjawiyatna, (1990), *Etika Filsafat Tingkah Laku*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 44-50

3. Aliran Vitalisme

Dalam pandangan aliran ini, yang baik adalah yang mencerminkan kekuatan dalam hidup manusia. Kekuatan dan kekuasaan yang menaklukkan orang lemah, itulah ukuran baik; manusia yang kuasa itulah yang baik; siapa yang menang itulah yang baik.

4. Aliran Sosialisme

Dalam pandangan aliran ini, masyarakatlah yang menentukan baik buruknya tindakan manusia. Lebih jelas lagi, apa yang lazim dianggap baik oleh masyarakat tertentu, itulah yang baik. Dan inilah yang disebut aliran sosialis dalam etika.

Melihat pandangan aliran sosialis ini, dapat dipahami bahwa pengaruh budaya dan adat istiadat dalam suatu lingkungan turut andil memformulasikan ukuran moral yang diinginkan oleh semua pihak. Ini memang tidak sepenuhnya salah karena kodrat manusia juga cenderung kepada kebaikan. Dalam kaedah *Ushul Fiqh* juga diterangkan “*al-‘Adatu Muhakkamah*” adat kebiasaan dalam suatu tempat dapat dijadikan sebagai hukum, tentunya jika tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Aturan-aturan atau adat yang digagas oleh para tokoh pun tentu dengan pertimbangan rasio yang masuk akal dan tidak banyak mendapat kecaman dari berbagai pihak. Jika aturan-aturan yang dicetuskan mendapat sambutan yang layak, maka seyogyanya adat dan aturan itu juga bisa dijadikan tolak ukur demi kemaslahatan umat.

5. Aliran Religiosisme

Aliran ini dalam pandangan Peodjawiyatna adalah aliran paling baik, karena yang baik itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan, dan yang buruk itu harus buruk pula di hadapan Tuhan. Maka dalam hal ini tugas theologilah yang menentukan, manakah yang menjadi kehendak Tuhan.

Terdapat bermacam-macam agama, di mana masing-masing agama mengutarakan pedoman hidup kehendak Tuhan yang dalam prakteknya memiliki perbedaan. Misalnya perbedaan pandangan dalam hal poligami, talak dan rujuk, aturan makan dan minum, hubungan suami istri dan sebagainya.

6. Aliran Humanisme

Dalam pandangan aliran humanisme, yang baik ialah yang sesuai dengan kodrat manusia. Dalam tindakan kongkrit manusia yang menjadi ukuran, sehingga pikiran, rasa, situasi seluruhnya akan sangat menentukan baik buruknya tindakan kongkrit itu. Penentuan dari baik buruk tindakan itu berhubungan dengan kata hati orang yang bertindak.

Yang diutarakan oleh humanisme dan tiap aliran ialah ukuran abstrak, ukuran objektif, terlepas dari subjek yang melakukan tindakan itu. Maka dapat dirumuskan : *tindakan yang baik ialah tindakan yang sesuai dengan derajat manusia*, jadi tidak mengurangi atau menentang kemanusiaan.²⁷

Karakter dan Budi Pekerti yang Terlupakan

Budaya dan karakter bangsa di masa silam pernah menuai pujian dari bangsa-bangsa lain. Budaya sopan-santun, karakter lemah-lembut, patuh terhadap aturan dan undang-undang, taat kepada hukum, menjaga nilai-nilai kemanusiaan serta arif dalam menjalankan amalan agama adalah bagian integral dari karakter bangsa yang dewasa ini seolah hilang tanpa jejak.

Menurut Imam al-Ghazali, yang dikutip oleh Sudarsono mengemukakan tujuan pokok moral (etika) ialah “*at-takhalluq bitakhalluq biakhlaqillah* ‘*ala thaqatil basyariyah*” atau pada semboyannya yang lain “*al-isyafu bi-shifatirrahman* ‘*ala thaqatil basyariyah*”. Maksud semboyan itu adalah agar manusia sejauh kesanggupannya meniru karakter/perangai dan sifat-sifat ketuhanan seperti pengasih, penyayang, pengampun (pema’af), dan sifat-sifat yang disukai Tuhan, sabar, jujur, takwa, zuhud, ikhlas, beragama, dan sebagainya.²⁸ Karakter-karakter seperti ini telah diaplikasikan oleh bangsa ini pada era sebelum kemerdekaan bahkan awal kemerdekaan hingga masa kemerdekaan. Kehidupan akhlak, prilaku, moral dan pengejawantahan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kasih-sayang, sopan-santun adalah bagian ceriman hidup bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Semuanya diformulasikan dalam sebuah semboyan dalam Lambang Negara Garuda Pancasila yang dikenal dengan *Bhinneka Tunggal Ika*.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 49

²⁸ Sudarsono, (1996), *Filsafat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 71-72

Bila dirujuk kepada ide-ide karakter bangsa di atas, yang notabene relevan dengan paparan Imam Al-Ghazali, mestinya umat Islam didorong agar selalu beramal ibadah mendekatkan diri (*taqarrub ilallah*) sesuai dengan prinsip Islam. Oleh sebab itu Al-Ghazali menganggap Tuhan sebagai Pencipta yang berkuasa, yang memelihara dan menyebarkan rahmat (kebaikan) bagi sekalian alam. Maka Tuhan sebagai Penyebar Rahmat, mesti dijadikan sebagai contoh bagi manusia untuk menerapkan perilaku-prilaku Islami yang diaplikasikan melalaui penanaman nilai-nilai kasih sayang, cinta, ramah-tamah, dan selalu mengedepankan nilai-nilai kejujuran di atas hal apapun.

Jika kita merujuk kepada ahli pendidikan Islam al-Razi, beliau mengemukakan bahwa moralitas seseorang dalam kehidupan harus seimbang. Hidup ini jangan terlalu zuhud tetapi jangan pula terlalu tamak. Yang paling baik adalah moderat. Artinya jangan terlalu mengumbar nafsu tetapi jangan pula terlalu membunuh nafsu. Segala sesuatu itu hendaknya menurut kebutuhan saja. Untuk mencapai tujuan tersebut, al-Razi membuat dua buah batas. *Pertama*, batas tertinggi adalah menjauhi kesenangan yang hanya dapat diperoleh dengan jalan menyakiti orang lain ataupun bertentangan dengan rasio. *Kedua*, batas terendah ialah menemukan apa yang tidak merusak atau menyebabkan penyakit dan berpakaian sekadar untuk menutup tubuh.²⁹

Dari kutipan tersebut dipahami, al-Razi menginginkan kehidupan umat ini tidak terlampau menyolok di hadapan orang lain. Dalam arti hukum kehidupan yang dijalani harus seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Cara berpakaian, makanan, dan pembicaraan dalam pergaulan harus disesuaikan nilai-nilai yang berlaku umum di khalayak ramai, yang sesuai dengan aturan agama Islam, sehingga tidak ada penyimpangan-penyimpangan paham yang bertentangan dengan syariat Islam.

Melihat aliran-aliran yang telah dijelaskan terdahulu, penulis lebih sepakat dengan standarisasi nilai-nilai moral yang sesuai dengan ajaran Islam, namun bukan berarti nilai-nilai moral yang diajukan oleh aliran lain tidak bisa dipakai. Semua nilai moral tersebut sama-sama mengajukan argumen yang bisa dipakai sebagai landasan dan standar perilaku. Namun pada hakekatnya penulis lebih cenderung untuk mengambil aliran religiosisme dan aliran Islam yang diutarakan oleh al-Ghazali dan al-Razi serta memadukannya dengan aliran sosialisme. Perpaduan ketiga aliran ini akan memiliki landasan yang lebih kuat karena mengambil budaya masyarakat yang dianggap baik dan dihubungkan dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, standarisasi moral (budi pekerti) yang akan diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan, SD, SMP atau SMA bahkan Perguruan Tinggi akan lebih terarah kepada pembentukan moralitas yang baik dan terealisasi secara fitrah (sesuai nilai-nilai insani dan Ilahi).

Sehubungan dengan standarisasi moral, penulis juga cenderung untuk membuat beberapa klasifikasi yang bisa mencerminkan kebaikan moral seorang anak. Dalam hal ini penulis mengutip beberapa kategori yang diutarakan Nurcholis Madjid. Ia mengemukakan, dalam pendekatan pendidikan keagamaan bagi anak, termasuk pembinaan budi pekerti, moral, dan karakter bangsa diperlukan nilai-nilai yang harus dipertimbangkan sebagai pegangan untuk ditanamkan terhadap kepribadian anak, yaitu: (1) Silaturahmi (*silah al-rahiim*); (2) Persaudaraan (*ukhuwah*); (3) Persamaan (*al-musawah*); (4) Adil ('adl); (5) Baik sangka (*husnuzhan*); (6) Rendah hati (*tawadhu*); (7) Tepat janji (*al-wafa*); (8) Lapang dada (*insyirah*); (9) Dapat dipercaya (*al-amanah*); (10) Perwira ('*iffah*); (11) Hemat (*Qawamiyyah*); (12) Dermawan (*al-munfiqun*).³⁰

Keduabelas poin yang disampaikan oleh Nurcholis, ini bisa digolongkan kepada standar moral sekaligus karakter yang dituntut bagi setiap anak didik di Nusantara Indonesia. Keduabelas poin ini menjadi standar pendekatan bagi pendidikan karakter di kalangan anak didik, baik dari hubungan antara sesama siswa, hubungan persaudaraan, senasib sepenanggungan serta memiliki basis moralitas yang kuat dan tangguh, tidak mudah goyah, bahkan memiliki prinsip yang teguh dalam kebersamaan dan kokoh dalam keimanan.

Zakiah Daradjat menegaskan bahwa orang tua harus memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Pendidikan yang diterima dari orang tua itu akan menjadi dasar dari pembinaan kepribadian si anak. Dengan kata lain orang tua jangan membiarkan pertumbuhan anak berjalan tanpa bimbingan, atau hanya diserahkan kepada para guru di sekolah saja. Inilah kekeliruan yang banyak terjadi dalam masyarakat.³¹ Apa yang diutarakan Daradjat, merupakan intisari dari pentingnya jalinan kerjasama antara pihak orang tua dengan sekolah, dalam hal ini orang tua tidak bisa lepas tangan begitu saja dalam pembinaan budi pekerti anak. Orang tua merupakan kunci utama dan sangat menentukan bagi pembentukan budi pekerti serta keseluruhan perkembangan jiwa anak ke depan. Untuk itu

²⁹ *Ibid.*, hlm. 56

³⁰ Nurcholis Madjid, (2001), "Peran Pendidikan Agama Bagi Pertumbuhan Anak Saleh", dalam Andi Hakim Nasution, dkk., *Pendidikan dan Agama; Akhlak Bagi Anak dan Remaja*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hlm. 37-40

³¹ Zakiah Daradjat, (1982), *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 47

berbagai pendekatan menuju terbentuknya moralitas anak, harus benar-benar diperhatikan dan diawasi terus-menerus sepanjang ia masih dalam tahap perkembangan dan masih mengecap dunia pendidikan.

Dari beberapa aliran dan pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa standarisasi moral yang akan diteliti sebagai tindak lanjut dari berhasil tidaknya penerapan pendidikan berbasis budi pekerti dapat diteliti dengan mengedepankan keduabelas poin tersebut, dan ditambah dengan beberapa unsur seperti: Kedisiplinan, Kejujuran, Kebersihan, Kerajinan, Keaktifan beribadah, dan sebagainya.

Konsep-konsep inilah yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan yang sedang marak dengan kerusakan moral di beberapa wilayah Nusantara, bahkan dunia. Nilai-nilai pendidikan budi pekerti yang ideal sebagaimana diterapkan Rasulullah saw seolah-olah hilang, lenyap, terlupakan oleh hiruk-pikuknya kehidupan yang semakin kosmopolit. Pendidikan karakter bangsa yang dulunya terapkan secara baik dan berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan terlupakan begitu saja. Oleh karena itu perlu bimbingan guru dan orang tua untuk merekonseptualisasi nilai-nilai budi pekerti itu sesuai karakter bangsa dan arahan-arahan para tokoh, pembaharu dan agamawan sebagaimana nilai-nilai yang telah disinggung di atas. Rusaknya moral bangsa ini tidak lepas dari pengawasan pendidikan di rumah dan juga tidak luput dari bimbingan dan ajaran para guru. “Apabila guru kencing berdiri, maka murid akan kencing berlari, apabila guru kencing berlari-lari, maka murid akan kencing menari-nari” Ini adalah pepatah yang sering digunakan untuk menyindir para guru yang tidak siap dalam membina dan mengarahkan moralitas anak bangsa yang sudah terpuruk.

Kesimpulan

Pendidikan bangsa Indonesia memuat berbagai macam pendekatan budi pekerti, yang pada akhirnya mengacu kepada pembentukan karakter umat manusia. Karakter yang berasal dari budaya bangsa termasuk pengejawantahan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kasih-sayang, sopan-santun (bagian ceriman hidup bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya). Semuanya diformulasikan dalam sebuah semboyan dalam Lambang Negara Garuda Pancasila yang dikenal dengan *Bhinneka Tunggal Ika*. Karakter bangsa juga meliputi peniruan terhadap agar manusia sejauh kesanggupannya meniru karakter/perangai dan sifat-sifat ketuhanan seperti pengasih, penyayang, pengampun (pema’af), dan sifat-sifat yang disukai Tuhan, sabar, jujur, takwa, zuhud, ikhlas, beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Maududi, Abul A'la al-, (1997), *Ethical Viewpoint of Islam*, terj. A. Rahman Zainuddin, *Moralitas Islam*, Media Dakwah, Jakarta
- Marimba, Ahmad D., (1989), *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, al-Ma'arif, Bandung
- Hanbal, Ahmad ibn, (1994), *Musnad li Imam Ahmad ibn Hanbal*, Juz 3, Dar al-Fikri, Bairut

- Departemen Pendidikan Nasional, (2002), *Pendidikan Budi Pekerti Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1995), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Umar, Husein, (2003), *Strategic Management in Action*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- SJ., J. Drost, (2005), *Dari Kurikulum Bertujuan Kompetensi (KBK) Sampai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*, Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Brubacher, John S., (1958), *Modern Filoshofis of Education in Cultural Perspective*, The Dryden Press, New York
- Kabir Helminski, (2002), *The Knowing Heart; A Sufi Path of Transformation*, terj. Abdullah Ali, *Hati yang Bermakrifat*, Pustaka Hidayah, Bandung
- Reksohadiprodo, Ki Mohamad Said, (1983), *Masalah Pendidikan Nasional*, Haji Masagung, Jakarta
- Arifin, M, (1987), *Filsafat Pendidikan Islam*, Bina Aksara, Jakarta
- Abrasyi, M. Athiyah al-, (1977), *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta
- Ekosusilo, Madyo dan R.B. Kasihadi, (t.t.), *Dasar-dasar Pendidikan*, Effhar Publishing, Semarang
- Ali, Muhammad, (t.t.), *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta
- Zahri, Mustafa, (1995), *Kunci Memahami Ilmu Tasawuf*, Bina Ilmu, Surabaya
- Madjid, Nurcholis, (2001), "Peran Pendidikan Agama Bagi Pertumbuhan Anak Saleh", dalam Andi Hakim Nasution, dkk., *Pendidikan dan Agama; Akhlak bagi Anak dan Remaja*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta
- Poedjawiyatna, (1990), *Etika Filsafat Tingkah Laku*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudarsono, (1996), *Filsafat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta
- Poespoprodjo, W, (1988), *Filsafat Moral, Kesusilaan dalam Teori dan Paktek*, Remadja Rosdakarya, Bandung
- Daradjat, Zakiah, (1982), *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*, Bulan Bintang, Jakarta